

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS IDM (INDEKS DESA MEMBANGUN) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020

¹Cealistya Yoelislamy Herawan, ²Rahman Mulyawan , ³Desi Yunita

¹Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

^{2,3}Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Email korespondensi : cealistya18001@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the formulation of the Village Development Index (IDM) contained in the 2015-2019 National Medium Term Development Plan (RPJMN) book. Through this RPJMN, the realization of the main strategic goals is to reduce the number of underdeveloped villages to 5,000 villages in 2019 and increase the number of independent villages to at least 2,000 villages. This development goal needs to clarify the village and its development status. The construction village index not only helps to understand the development status of each village which is closely related to its characteristics, but also serves as a tool to achieve the goals of the 2020-2024 RPJMN. The purpose of this research is to determine development planning based on the village building index in order to realize the independence of the Ciamis district community in 2020. the method used by this researcher is a descriptive research method with a qualitative approach. The results of this study are that the IDM points have reached the target and even exceeded the targeted points. It is clear that the Ciamis district has succeeded in raising the status of its villages, in 2019 there are still underdeveloped villages then in 2020 these underdeveloped villages no longer exist.

Keywords: *Development Planning; Developing Village Index; Village Status*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rumusan Indeks Pembangunan Desa (IDM) yang tertuang dalam buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Melalui RPJMN ini, realisasi sasaran strategis utamanya adalah mengurangi jumlah desa tertinggal menjadi 5.000 desa pada tahun 2019 dan menambah jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Tujuan pembangunan ini perlu memperjelas desa dan status pembangunannya. Indeks desa konstruksi tidak hanya membantu untuk memahami status pembangunan setiap desa yang berkaitan erat dengan karakteristiknya, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan RPJMN 2020-2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pembangunan yang berbasis indeks desa membangun dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat kabupaten Ciamis pada tahun 2020 . metode yang digunakan peneliti ini yaitu metode penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah poin IDM mencapai target bahkan melebihi poin yang ditargetkan sudah jelas bahwa kabupaten Ciamis berhasil menaikkan status desa-desa nya , pada tahun 2019 masih terdapat desa tertinggal lalu pada tahun 2020 desa tertinggal tersebut sudah tidak ada lagi .

Kata kunci : *Perencanaan Pembangunan; Indeks Desa Membangun; Status Desa*

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan bentuk usaha pembangunan yang berkelanjutan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional sudah tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945 pada alinea ke IV yaitu yang berbunyi " melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ".

Kurangnya perpaduan Lintas sektoral antar Provinsi dengan Nasional antar sesama Provinsi yang berdekatan , serta antara Kabupaten dan Kota . Beberapa hal tersebut merupakan alasan mengapa sampai saat ini sistem perencanaan pembangunan di Indonesia masih lemah , semua itu mengakibatkan masing-masing program pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi kurang saling mendukung satu sama lain sehingga sinergi yang diharapkan akan dapat mendorong proses pembangunan secara keseluruhan tidak dimanfaatkan secara maksimal . Dengan diterapkannya otonomi daerah permasalahan semakin serius yang dimana masing-masing daerah mementingkan daerahnya sendiri . Kondisi tersebut akan menyebabkan kurang terarahnya program dan kegiatan

pembangunan daerah untuk mencapai tujuan nasional pembangunan Indonesia.

Hasil atau output dari suatu rencana berupa rencana tertulis . Dokumen perencanaan ini pada hakikatnya merupakan dokumen publik yang proses penyusunannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Proses perencanaan sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh tenaga ahli yang mumpuni , tetapi untuk mendapatkan manfaat dari partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan, masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses tersebut . Untuk dapat menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas, diperlukan pedoman praktis dan operasional agar para perencana di berbagai daerah dapat dengan mudah menyusunnya . Panduan yang praktis dan operasional pada kegiatan ini sangat penting untuk kapasitas perencana di tingkat Kabupaten atau tingkat Kota masih relatif lemah dibandingkan dengan para perencanaan di tingkat Nasional. Selain itu, data yang tersedia di daerah juga terbatas dengan tingkat akurasi yang rendah, sehingga teknik perencanaan yang digunakan harus sesuai dengan kondisi daerah dan dipahami oleh masyarakat.

Pembangunan jangka panjang secara nasional dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau singkatnya RPJP untuk periode 20 tahun . RPJP Nasional tersebut mencakup visi , misi , dan arah pembangunan secara nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan

terbentuknya pemerintahan Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. RPJP Nasional ini selanjutnya dijadikan landasan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau singkatnya RPJM nasional untuk periode 5 tahunan . RPJM nasional ini memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh . Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ialah kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Sejak tahun 2005 sampai saat ini sudah terdapat empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah disusun berdasarkan masa kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih.

Indikator pembangunan daerah ditetapkan dalam RPJM yang tercantum dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara, Penyusunan , Pengendalian , dan Evaluasi Pelaksanaan , Rencana Pembangunan Daerah . Indikator tersebut yaitu :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Persentase Penduduk Miskin (Angka Kemiskinan)
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4. Kabupaten Ciamis pada saat ini sudah memasuki tahap ke IV yaitu merupakan tahap terakhir untuk mencapai kesejahteraan pada RPJP . Hal tersebut dibuktikan melalui penyusunan RPJMD tahun 2019-2024 berdasarkan RPJP tahun 2005-

2025. Pencapaian kesejahteraan di Kabupaten Ciamis saat ini diupayakan dengan menitikberatkan pada penciptaan struktur sosial ekonomi masyarakat yang kuat berlandaskan kemandirian dan keunggulan bersaing, didukung oleh sumber daya manusia yang berdaya saing, infrastruktur yang baik serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Ciamis masih rendah, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masih belum optimal, pelaksanaan otonomi desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa belum optimal. Diatas merupakan beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Ciamis , berikut jika disajikan kedalam tabel .

Table 1 Permasalahan di Kabupaten Ciamis

No	Permasalahan	Akar Permasalah
1.	Kualitas Pembangunan Manusia Masih Rendah	-Pelaksanaan pendidikan pemerataan (Paket B dan Paket C) belum optimal karena keterbatasan dana. - Keterbatasan akses layanan pendidikan formal

		dan nonformal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin. - Akses pelayanan kesehatan masih rendah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. - Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat (PHBS) masih rendah. -Pendapatan masyarakat masih rendah untuk menutupi kebutuhan dasar dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
2	Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi belum optimal	- Perekonomian daerah tidak dibangun secara optimal dari usaha ekonomi kerakyatan (ekonomi kerakyatan) berdasarkan potensi yang ada, padahal usaha ekonomi tersebut secara realistis dapat meningkatkan pendapatan

		masyarakat dan menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan ekonomi dan berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. - Program-program pembangunan ekonomi masih belum selesai, belum tuntas dan belum tanggap sehingga kurang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. - Sinergi pembangunan ekonomi sangat lemah (antar sektor, antar sumber daya, antar wilayah). - Ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang kurang memadai. - Sarana dan prasarana keuangan belum dimanfaatkan secara optimal
3	Pelaksanaan Otonomi Desa	- Kurangnya kepemimpinan dan

	berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum optimal	pengawasan pemerintah daerah melalui OPD selain OPD desa. - Sinergi antara pembangunan desa dan pembangunan daerah masih lemah (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan). - Kapasitas pengurus desa masih lemah. - Kemandirian masyarakat desa khususnya di bidang ekonomi masih lemah.
--	--	---

Sumber : RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

Berdasarkan pemaparan diatas teori perencanaan menurut John Friedman yang akan digunakan untuk penelitian ini yang didalamnya ada 4 aspek yaitu reformasi sosial, analisis kebijakan, pembelajaran sosial dan mobilisasi sosial .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai mengenai perencanaan pembangunan yang berbasis indeks desa membangun (IDM) dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat di Kabupaten Ciamis tahun 2020.

Metode

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Perencanaan Pembangunan Berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dalam rangka Mewujudkan Kemandirian Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2020 . Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Alasan penulis menggunakan metode deskriptif karena metode ini menggambarkan keadaan sebenarnya dari objek penelitian, baik dari hasil observasi maupun laporan sebagai bahan analisis. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan keadaan sebenarnya Perencanaan Pembangunan Berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) Ralam Rangka Mewujudkan Kemandirian Masyarakat di Kabupaten Ciamis

Pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian dimana data yang diperoleh menjadi bentuk tolak ukur keberlangsungan pada penelitian sebagai bentuk valid dalam menyimpulkan hasil akhir nanti sebagaimana Menurut Sugiyono (2016:224) “ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data .” Pada teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan document pendukung serta studi pustaka. Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini , peneliti melakukan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi lapangan dan studi pustaka . Cara yang dapat menguatkan fakta-fakta di dalam studi lapangan selain wawancara dan observasi adalah dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini

dilakukan oleh peneliti untuk memperkuat fakta dari data-data yang tersedia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Reformasi Sosial

Pada era reformasi saat ini, Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan pembangunan baik dari segi infratraktur maupun suprastruktur untuk mewujudkan peningkatan pembangunan Nasional, harus berawal dari peningkatan pembangunan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan setiap potensi daerah dengan sebaik-baiknya sebagai penunjang peningkatan pembangunan daerah tersebut, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan ini sangat diperlukan agar dapat membantu pengambil keputusan memperoleh informasi yang relevan dengan keputusan yang dibuat. Kegiatan analisis kebijakan ini dapat dilakukan melalui penelitian dengan mengkaji dan memisahkan masalah yang dapat menimbulkan konflik antara tujuan dan upaya, menyarankan opsi baru serta mengusulkan cara untuk menyampaikan ide dalam perumusan kebijakan tersebut. Kontribusi utama dari proses pembuatan analisis kebijakan ini adalah memberikan saran terkait keputusan dengan memperhitungkan sensitivitas dan urutan kepentingan dari parameter yang ditetapkan.

Berbagai program afirmatif dari pemerintah di dalam mewujudkan pembangunan desa mesti dilanjutkan dengan penghitungan capaian keberhasilan kemajuan pembangunan. Untuk mencapai

tujuan itu beberapa lembaga pemerintah membuat penghitungan indikator dengan output kategorisasi desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri tentang Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai acuan data dasar mengukur pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan (Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016). Dengan indikator inilah maka desa dapat menjadikannya sebagai instrumen atau alat ukur capaian pembangunan desa, sehingga pada indikator mana yang dinilai belum maupun telah tercapai dapat diketahui. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Di bawah ini tersaji rata-rata nilai IDM untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Barat :

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA	IKS	IKE	IKL	NILAI IDM	STRATA DESA
	PROVINSI JAWA BARAT	5.312	0,7913	0,6353	0,6636	0,6967	BERKEMBANG
1	KOTA BANJAR	16	0,9268	0,7104	0,8417	0,8263	MANDIRI
2	KABUPATEN BANDUNG BARAT	165	0,8528	0,6895	0,7168	0,7530	MAJU
3	KABUPATEN BANDUNG	270	0,8455	0,7125	0,6993	0,7524	MAJU

4	KABUPATEN INDRAMAYU	309	0,7905	0,6693	0,6855	0,7151	MAJU
5	KABUPATEN CIAMIS	258	0,8041	0,6587	0,6770	0,7133	MAJU
6	KABUPATEN MAJALENGKA	330	0,7842	0,6449	0,6990	0,7094	MAJU
7	KABUPATEN PANGANDARAN	93	0,7915	0,6468	0,6796	0,7059	BERKEMBANG
8	KABUPATEN KUNINGAN	361	0,7875	0,6101	0,7082	0,7019	BERKEMBANG
9	KABUPATEN BOGOR	416	0,8183	0,6518	0,6303	0,7001	BERKEMBANG
10	KABUPATEN SUKABUMI	381	0,8056	0,6143	0,6654	0,6951	BERKEMBANG
11	KABUPATEN SUMEDANG	270	0,7924	0,6377	0,6499	0,6933	BERKEMBANG
12	KABUPATEN SUBANG	245	0,7956	0,6179	0,6550	0,6895	BERKEMBANG
13	KABUPATEN CIREBON	412	0,7779	0,6319	0,6566	0,6888	BERKEMBANG
14	KABUPATEN BEKASI	180	0,8075	0,6444	0,6126	0,6881	BERKEMBANG
15	KABUPATEN CIANJUR	354	0,7741	0,6052	0,6689	0,6827	BERKEMBANG
16	KABUPATEN GARUT	421	0,7598	0,6133	0,6500	0,6744	BERKEMBANG
17	KABUPATEN KARAWANG	297	0,7756	0,6274	0,6137	0,6722	BERKEMBANG
18	KABUPATEN PURWAKARTA	183	0,7681	0,6111	0,6277	0,6690	BERKEMBANG
19	KABUPATEN TASIKMALAYA	351	0,7527	0,6031	0,6507	0,6689	BERKEMBANG

Dilihat dari tabel diatas bahwa nilai IKE Kabupaten Ciamis Lebih kecil dibanding nilai IKL dan IKS maka nilai IKE Kabupaten Ciamis harus menjadi perhatian. Untuk Indeks Ketahanan Sosial yang

menjadi standar penilaian yaitu Pelayanan kesehatan, Keberdayaan masyarakat untuk kesehatan, Jaminan kesehatan, Solidaritas sosial, Akses fasilitas informasi dan komunikasi, Akses ke fasilitas listrik, Akses ke fasilitas sanitasi, Akses air bersih dan layak minum, Kesejahteraan Soaial, Toleransi, Rasa aman warga desa, Akses pendidikan dasar menengah, Akses pendidikan Non formal dan Akses pengetahuan masyarakat.

Fasilitas pelayanan sosial sudah terdapat diberbagai kecamatan seKabupaten Ciamis , diataranya ada puskesmas , posyandu , TK , fasilitas pendidikan seperti SD ,SMP/MTS ,SMA/SMK sekarang sudah terdapat disetiap kecamatan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya. Untuk Indeks Ketahanan Lingkungan yang menjadi standar atau sasaran yaitu, bagaimana keadaan lingkungan Pencemaran air,tanah dan udara, Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan) dan Upaya/ tindakan terhadap potensi bencana alam yang terjadi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai pelaksana kebijakan sudah sangat memahami apa yang menjadi standar dan sasaran kebijakan Indeks Desa Membangun selanjutnya dalam pengisian kuisioner penilaian IDM para stakeholder yang terlibat sangat kooperatif dan jujur berdasarkan apa yang terjadi dilapangan. Lalu ntuk meningkatkan nilai IKE beberapa kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan lokus wiayah desa harus diarahkan pada peningkatan keragaman produksi masyarakat desa ,penyediaan pusat pelayanan perdagangan,peningkatan akses distribusi atau logistik ,peningkatan akses ke lembaga keuangan atau perkreditan , pembentukan lembaga ekonomi seperti koperasi serta penyediaan insfrastruktur

untuk menunjang keterbukaan wilayah seperti pembangunan jala desa atau penghubung desa dan pemenuh transportasi antar desa. Para stakeholder yang terlibat di Kabupaten Ciamis sudah sangat memahami terkait apa yang menjadi kebijakan dari Indeks Desa Membangun (IDM) sehingga setiap tahunnya status desa-desa di Kabupaten Ciamis berubah status menjadi lebih baik .

Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai pelaksana dari kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) sudah sangat memahami sehingga pemerintah selalu mengupayakan yang terbaik untuk meningkatkan status-status desa



Data diatas merupakan data yang dikeluarkan oleh Kementrian Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2019 Kabupaten Ciamis memiliki nilai indeks desa membangun sebesar 0,6887 sehingga menempati posisi ke 6, nilai tersebut masih menunjukan bahwa kabupaten Ciamis merupakan kabupaten dengan status berkembang namun pada tahun 2020 kabupaten Ciamis mampu menaikkan status tersebut menjadi maju dengan nilai indeks desa membangun sebesar 0,7133 sehingga menempati posisi ke 5 dari jumlah keseluruhan desa 258 desa dalam 27 kecamatan , 19 diantaranya merupakan desa

dengan status desa mandiri ,93 dengan status desa maju dan 146 merupakan desa dengan status desa berkembang ,

Pembelajaran Sosial

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan tergolong kuat hingga sangat kuat .Hal ini disebabkan kesadaran dari masyarakat bahwa prioritas pembangunan dapat diusulkan pada setiap tahapan pembangunan, hasil pembangunan dapat dievaluasi, dan hasil pembangunan baik fisik maupun non fisik harus dijaga, dirawat dan dimanfaatkan secara optimal. Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan masyarakat relatif kuat, terutama terkait dengan kesediaan masyarakat untuk memberikan ide, tenaga dan sosialisasi untuk pembangunan desa, sesuai dengan kesediaan masyarakat untuk menyediakan materi/uang untuk pembangunan desa. yang termasuk dalam kategori cukup. Karena mereka memperkirakan dana di desa saat ini cukup, terutama dari DD dan ADD

Mobilisasi Sosial (Social Mobilization).

Pada dasarnya pemanfaatan potensi sumberdaya masyarakat ini harus diartikan sebagai usaha memanfaatkan atau memobilisasi sumberdaya yang sebelumnya belum pernah disentuh, tetapi dapat juga berarti meningkatkan daya manfaat atau optimalisasi sumberdaya yang sebelumnya belum digarap. Untuk memanfaatkan potensi sumberdaya masyarakat diperlukan kualitas manusia yang memiliki keterampilan yang inovatif. Sehingga sumberdaya manusia merupakan sumber daya pembangunan dalam mencapai kesejahteraan

Sumber daya manusia menempati kedudukan dan peran yang sangat penting dalam pembangunan sebagai pengelola dan

pelaku pembangunan yang dapat memberikan manfaat dan perbaikan kehidupan dan kesejahteraan manusia Pelaksanaan kebijakan IDM perlu sumber daya manusia yang baik sebagai penggerak yang produktif untuk pelaksanaan suatu kebijakan. Kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila sumber daya manusianya memadai dalam suatu organisasi. Untuk mengetahui sumber daya manusia manusia yang ada di Kabupaten Ciamis

Analisis SWOT terkait Perencanaan Pembangunan Bebasis IDM (Indeks Desa Membangun) dalam rangka Mewujudkan Kemandirian Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2020

Berikut disajikan kedalam tabel :

Kekuatan (strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
1.Regulasi jelas 2.Kebijakan sesuai dengan visi misi daerah 3.Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 4. Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan 5. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan sebagai modal pembangunan cukup besar.	1.Sosialisasi kepada masyarakat belum tersampaikan secara merata 2.Partisipasi masyarakat masih didominasi oleh orang-orang tertentu 3.Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan ekonomi belum optimal

Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
1. Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu; 2. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif 3. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya; 4. Adanya program-program bantuan dari provinsi dan pusat	1. Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan; 2. Kurangnya bantuan dari pihak swasta 3. Kelembagaan ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang belum berfungsi dengan baik dalam menyelenggarakan roda perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan 4. Sarana prasarana publik belum optimal mendukung

(Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan hasil wawancara ,2022)

Berdasarkan tabel diatas , kekuatan , kelemahan , peluang dan ancaman perlu digabungkan untuk menghasilkan strategi keterkaitan faktor internal dan faktor eksternal,berikut disajikan dalam tabel :

	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Kekuatan (strenghts)	1.Mengoptimalkan pelaksanaan visi misi dengan program dari pemerintah provinsi 2.Mengoptimalkan anggaran untuk mengolah SDA yang ada 3.Memberdayakan potensi SDM dengan dibantu oleh para pegawai pemerintahan	1.Mengoptimalkan pemahaman regulasi terkait 2.Memaksimalkan pemberdayaan kepada masyarakat terkait perencanaan pembangunan 3.Memaksimalkan anggaran untuk peningkatan kelembagaan ekonomi
Kelemahan (Weakneses)	1.Mengoptimalkan pengelolaan potensi desa 2.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk memanfaatkan potensi yang dapat meningkatkan perekonomian 3.Membangun sarana dan prasarana penunjang ekonomi.	1.Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan 2.Mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada untuk menghadapi persaingan wilayah 3.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar aktif dalam berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

(Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan hasil wawancara ,2022)

Upaya alternatif terhadap hasil analisis SWOT pada Perencanaan Pembangunan berbasis IDM (Indeks Desa Membangun) dalam rangka Kemandirian Masyarakat di Kabupaten Ciamis

1. Pemanfaatan potensi desa Kabupaten Ciamis.Membangkitkan minat kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta.

2. Memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan potensi pedesaan dan mempromosikan produk komersial pedesaan.

3. Mengoptimalkan koordinasi antar masyarakat,pemerintah desa dan organisasi desa, serta pemerintah daerah.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan potensi daerah yang dapat mendorong pembangunan ekonomi.

5. Membangun infrastruktur pendukung ekonomi dan memanfaatkan hibah dari dana desa dan peluang untuk memasuki sektor swasta

6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar tetap aktif berpartisipasi dalam pembangunan .

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya , maka peneliti menyimpulkan :

1. Perencanaan Pembangunan berbasis IDM (Indeks Desa Membangun) dalam rangka Kemandirian Masyarakat di Kabupaten Ciamis ini berjalan dengan baik dengan diadakannya IDM (Indeks Desa Membangun) dapat meyakini pentingnya inisiatif dan kekuatan masyarakat pedesaan dalam proses kemajuan dan pemberdayaan kehidupan pedesaan dengan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Dengan ditentukannya nilai indeks desa membangun dapat dilihat diatas bahwa Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan status-status desa , dimana desa tertinggal sudah tiada .

Indeks desa membangun merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

2. Hasil Analisis SWOT dari Perencanaan Pembangunan berbasis IDM (Indeks Desa Membangun) dalam rangka Kemandirian Masyarakat di Kabupaten Ciamis

a. Kekuatan atau *strengths* merupakan faktor internal dan positif dari organisasi . Dalam perencanaan pembangunan berbasis indeks desa membangun (IDM) dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat mempunyai regulasi yang jelas , kebijakan ini juga sesuai dengan visi misi daerah yang nantinya akan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan , kesejahteraan dan kemandirian masyarakat .

b. Kelemahan atau *weaknesses* merupakan faktor internal yang bersifat negatif yang dapat menghambat kekuatan organisasi dan dapat menjadi kendala. Adapun kelemahan yang menjadi kendala dalam perencanaan pembangunan berbasis indeks desa membangun (IDM) dalam rangka kemandirian masyarakat sosialisasi kepada masyarakat belum tersampaikan secara merata , hal tersebut yang menyebabkan masyarakat kurang aktif dalam proses perencanaan pembangunan , ada beberapa masyarakat yang sudah ikut berpartisipasi akan tetapi masyarakat tersebut dari kalangan oleh orang-orang tertentu

c. Peluang atau *Opportunities* merupakan faktor eksternal yang dapat berkontribusi pada kesuksesan program organisasi .Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu.

d. Ancaman (*Threats*) merupakan faktor eksternal yang bersifat negatif yang cenderung sulit untuk dikendalikan . Organisasi harus mempertimbangkan hal ini agar dapat menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang muncul . Kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masih rendah dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Upaya alternatif terhadap hasil analisis SWOT pada Perencanaan Pembangunan berbasis IDM (Indeks Desa Membangun) dalam rangka Kemandirian Masyarakat di Kabupaten Ciamis

1. Pemanfaatan potensi desa Kabupaten Ciamis. Membangkitkan minat kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta.

2. Memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan potensi pedesaan dan mempromosikan produk komersial pedesaan.

3. Mengoptimalkan koordinasi antar masyarakat, pemerintah desa dan organisasi desa, serta pemerintah daerah.

References :

- Ridwan & Nashar.(2017) . Perencanaan Pembangunan Daerah . Bandung :Alfabeta.
- Riyadi & Bratakusumah.(2003).Perencanaan Pembangunan daerah Strategi Menggali potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah .Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sjafrizal.(2015).Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi Daerah.Jakarta:PT Rajagrafindo Persada..

Sugiyono.(2016).Metode Penelitian
Kuantitatif , Kualitatif dan
R&D.Bandung:Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Desa,Pembangunan
Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa
Membangun